KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Industri pertahanan, legislator harap ada konsistensi kebijakan
Tanggal : Minggu, 15 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Industri Pertahanan

Legislator Harap Ada Konsistensi Kebijakan

ANGGOTA Komisi I DPR Amelia Anggraini mendukung penguatan industri pertahanan nasional dengan konsistensi kebijakan dan integrasi rantai pasok. Tanpa kesinambungan visi dan dukungan regulasi jangka panjang, upaya membangun kemandirian industri pertahanan dinilai akan sulit terwujud secara berkelanjutan.

Jika konsistensi itu terjaga, lanjutnya, kemandirian industri pertahanan bukan hanya realistis, tapi juga strategis bagi posisi Indonesia di kawasan. Karena itu, sektor pertahanan perlu ditopang basis produksi yang kuat agar tidak bergantung pada proyek besar semata.

"Dengan integrasi kuat BUMN dan swasta dalam satu rantai pasok nasional, struktur industri akan lebih kokoh dan berdaya saing," ujar Amelia dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

Selanjutnya, Amelia menyoroti transisi program modernisasi TNI dari Minimum Essential Forces (MEF) menuju Optimum Essential Forces (OEF) sebagai momentum strategis. Perubahan ini harus dimanfaatkan untuk menjaga kesinambungan produksi industri pertahanan dalam negeri.

"Dengan perencanaan jangka panjang yang jelas, industri bisa membaca kebutuhan alutsista secara lebih pasti, sehingga investasi teknologi tidak dilakukan secara sporadis," katanya.

Politikus Partai NasDem itu mengingatkan, tanpa konsistensi kebijakan lintas pemerintahan, industri pertahanan nasional berisiko kehilangan arah. Karena ada tiga tantangan utama yang harus dijawab, yakni kesinambungan kebijakan, keberanian berinvestasi di teknologi tinggi, serta penguatan integrasi BUMN dan swasta.

Tanpa kepastian regulasi dan dukungan anggaran berkelanjutan, riset dan pengembangan sulit berjalan optimal. Sebab, industri pertahanan tidak bisa dibangun secara instan dan membutuhkan komitmen negara yang konsisten agar transfer teknologi benar-benar menghasilkan kemandirian produksi.

"Penguatan industri pertahanan nasional bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan bagian dari strategi menjaga kedaulatan dan memperkuat posisi Indonesia di kawasan maupun global," ucapnya.

WEB FRAKSIPKS.ID

Amelia Anggraini

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menambahkan, Pemerintah memiliki peran sentral dalam memperkuat industri pertahanan sebagai bagian dari strategi besar kemandirian nasional dan ketahanan negara. Karena itu, Komisi I DPR bersama Pemerintah berkomitmen mendorong industri pertahanan dalam negeri agar tumbuh berkelanjutan.

Dengan kebijakan yang tepat, dukungan anggaran yang konsisten, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia bisa mewujudkan kemandirian pertahanan sekaligus memperkuat posisi strategis di kawasan. Karena itu, penguatan industri pertahanan nasional harus ditopang oleh kebijakan yang konsisten dan terintegrasi.

Politikus PDIP itu mengingatkan, implementasi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan perlu dijalankan secara disiplin. Khususnya yang terkait dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan alutsista.

"Optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap proyek pengadaan pertahanan jadi instrumen penting untuk memperbesar nilai tambah di dalam negeri," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mendorong penyusunan roadmap jangka panjang industri pertahanan yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI, BUMN, swasta, serta lembaga riset dan perguruan tinggi. Setiap pengadaan alutsista harus disertai skema kerja sama yang memperkuat kapasitas industri dalam negeri.

"Baik melalui produksi bersama, transfer teknologi yang terukur, maupun peningkatan kemampuan desain dan rekayasa nasional," tegasnya.

Dalam ekosistem industri pertahanan, BUMN pertahanan diposisikan sebagai tulang punggung produksi alutsista strategis. BUMN seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212.

Namun, lanjutnya, peran swasta juga makin krusial sebagai mitra strategis yang memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi. Karena itu, DPR memberikan dukungan penuh terhadap penguatan industri pertahanan swasta nasional yang telah memiliki kapabilitas dan legalitas sesuai ketentuan Kemenhan.

"Perusahaan swasta bidang pertahanan harus mendapat ruang yang adil dan proporsional dalam ekosistem industri nasional. Mereka bagian integral dari kekuatan pertahanan kita," tandasnya. ■ PYB